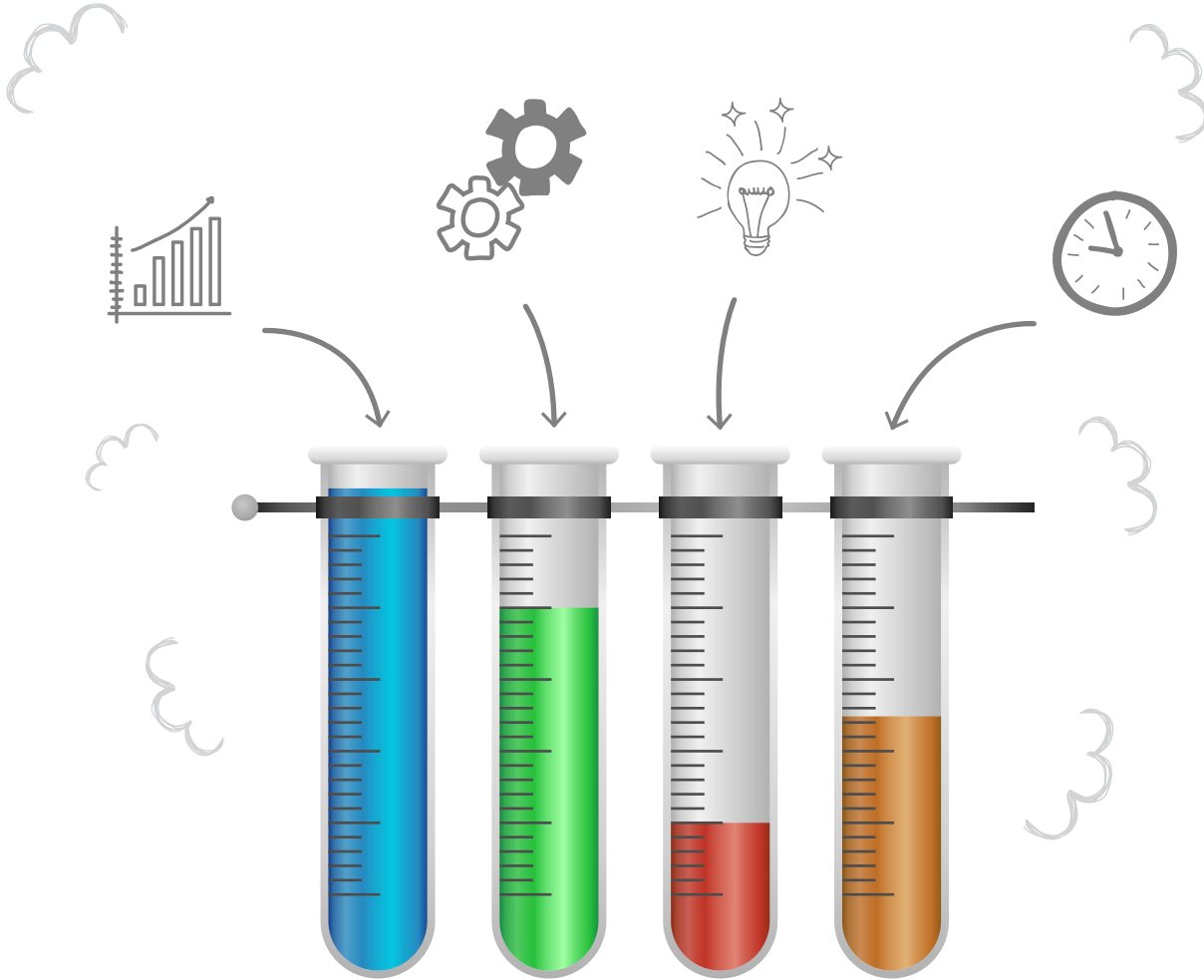


ROADMAP

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
Provinsi Jawa Tengah



OUTLINE



01. EXECUTIVE SUMMARY

02. PENDAHULUAN

- a. LATAR BELAKANG
 - b. TUJUAN DAN MANFAAT
 - c. KARAKTERISTIK INFLASI DAERAH
 - d. TANTANGAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
-

03. KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI

- a. PEMETAAN RISIKO INFLASI
 - b. KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI
 - c. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
-

04. PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

05. LAMPIRAN



EXECUTIVE SUMMARY



EXECUTIVE SUMMARY

- Permasalahan inflasi berupa menjaga kestabilan harga dan kecukupan pasokan, sebagian besar disebabkan oleh permasalahan yang bersifat fundamental dan struktural, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk menyamakan persepsi dan langkah pengendalian inflasi agar lebih terfokus, terarah serta berkesinambungan dalam jangka panjang, dibutuhkan sebuah pedoman yang menjadi acuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan suatu *roadmap* pengendalian inflasi.
- *Roadmap* pengendalian inflasi daerah mencakup berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjaga kestabilan harga dan kecukupan pasokan pangan, serta menjaga ekspektasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya disusun strategi program kerjanya, baik yang bersifat jangka pendek (2016-2017), jangka menengah (2018-2020), maupun jangka panjang (2021-2024), serta dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat.
- Permasalahan dalam menjaga kestabilan harga dan menjamin kecukupan pasokan didasarkan pada permasalahan inflasi di 8 komoditas utama penyumbang inflasi di Jawa Tengah, yaitu: beras, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng (kelompok *volatile foods*), elpiji (kelompok *administered price*), dan gula pasir (kelompok *core*). Permasalahan diidentifikasi melalui pendekatan rantai nilai, yang meliputi permasalahan dari hulu ke hilir (mulai dari faktor input, produksi, distribusi, hingga pemasaran), dan dikelompokkan berdasarkan objek permasalahan (SDM, teknologi, infrastruktur, kelembagaan, data & informasi, serta pembiayaan).
- Berdasarkan *roadmap* yang ada, penyusunan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat lebih terarah, terukur, dan menjadi pedoman bagi setiap anggota TPID untuk melaksanakan program sesuai dengan kewenangannya, serta dapat terus dilakukan monitoring dan evaluasi.

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG



TUJUAN DAN MANFAAT



KARAKTERISTIK INFLASI JATENG



LATAR BELAKANG

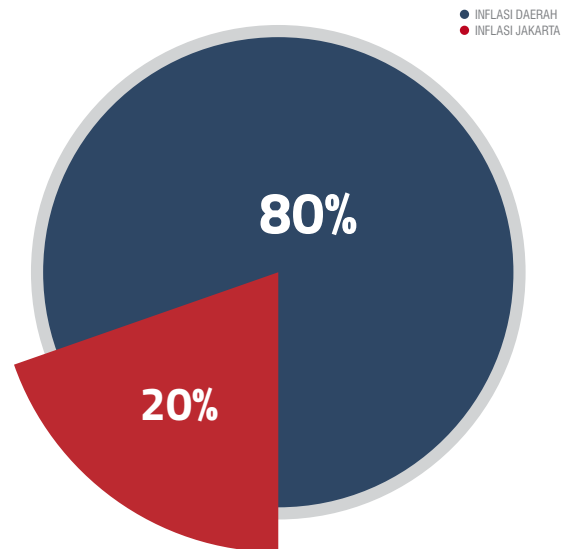
Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka tingkat inflasi harus dijaga agar tetap rendah dan stabil. Inflasi nasional merupakan agregat dari inflasi yang ada di daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi daerah merupakan hal yang penting.

Pengendalian inflasi daerah membutuhkan kerjasama dan koordinasi banyak pihak, baik dari sektor moneter, fiskal, dan riil. Salah satu bentuk kerjasama dan koordinasi yang ada saat ini adalah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Permasalahan inflasi, sebagian besar disebabkan oleh permasalahan yang bersifat fundamental dan struktural, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Untuk menyamakan persepsi dan langkah pengendalian inflasi agar fokus dan terarah dalam jangka panjang dan berkesinambungan, dibutuhkan sebuah pedoman yang menjadi acuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan suatu *roadmap* pengendalian inflasi.

Sumbangan Inflasi Nasional



Sumber: DKEM, BI, 2014



TUJUAN DAN MANFAAT

Menyusun pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terkait dalam menjalankan program dan kewenangannya dalam rangka pengendalian inflasi.

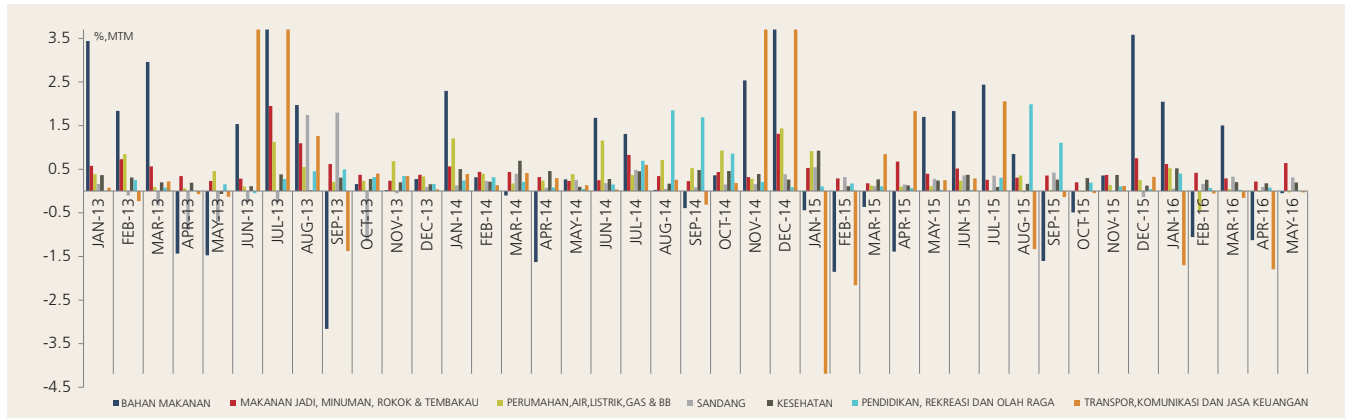


Dengan adanya pedoman tersebut, pengendalian inflasi dapat dilakukan **secara berkesinambungan dalam jangka panjang**



KARAKTERISTIK INFLASI JATENG

Berdasarkan disagregasi pengelompokan komoditas, inflasi Jawa Tengah lebih dipengaruhi oleh kelompok komoditas bahan makanan (terutama beras dan bumbu-bumbu) dan kelompok transpor (terutama bensin dan tarif angkutan antar kota).



- Salah satu faktor penyebab inflasi di Jawa Tengah adalah **gangguan pasokan bahan makanan** seperti beras, cabai, dan bawang merah akibat **distribusi yang belum berjalan baik**, karena hasil panen di Jawa Tengah banyak **terserap oleh daerah lain**.
- Inflasi juga bersumber dari **kelompok transpor**, terutama komoditas bensin yang sering menjadi penyumbang inflasi sebagai dampak kebijakan kenaikan harga oleh pemerintah. Kenaikan harga bensin secara historis selalu transmisi pada kenaikan **tarif angkutan**.

KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI

Pemetaan Risiko Inflasi



Identifikasi Permasalahan



PEMETAAN RISIKO INFLASI

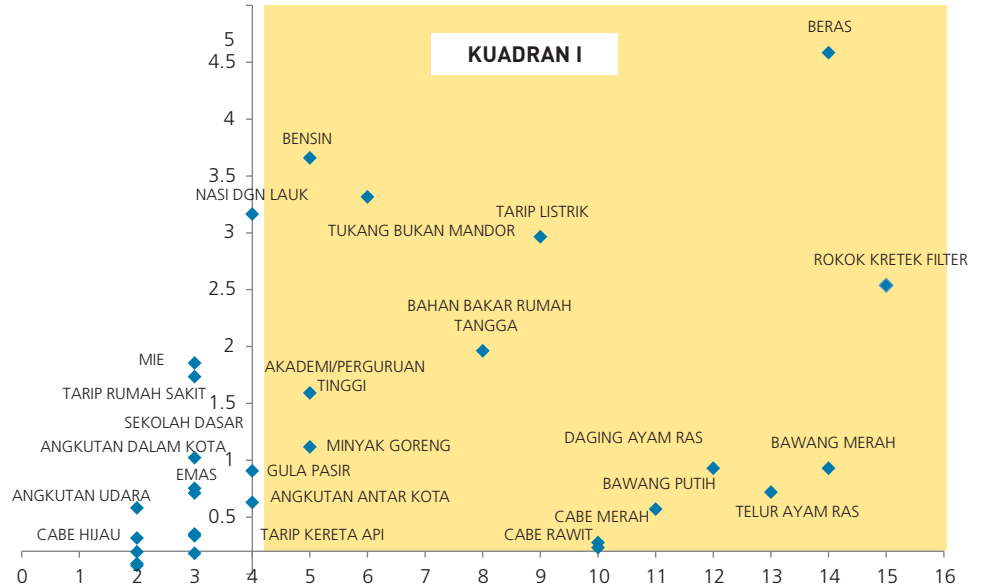
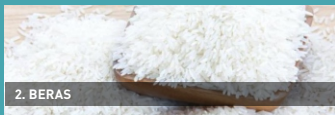
NO	KODE	KOMODITAS BERDASARKAN NILAI KONSUMSI TERBESAR	BOBOT	FREKUENSI (>0,02)	KUADRAN	RISIKO
1	203011	ROKOK KRETEK FILTER	2.539027536	15	I	TINGGI
2	101001	BERAS	4.585260659	14	I	TINGGI
3	109003	BAWANG MERAH	0.930877581	14	I	TINGGI
4	105015	TELUR AYAM RAS	0.719288988	13	I	TINGGI
5	102009	DAGING AYAM RAS	0.930937195	12	I	TINGGI
6	109004	BAWANG PUTIH	0.571598651	11	I	TINGGI
7	109029	CABE MERAH	0.275968435	10	I	TINGGI
8	109030	CABE RAWIT	0.232369673	10	I	TINGGI
9	302021	TARIP LISTRIK	2.964715654	9	I	TINGGI
10	302025	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1.96343025	8	I	TINGGI
11	301059	TUKANG BUKAN MANDOR	3.316334121	6	I	TINGGI
12	110004	MINYAK GORENG	1.117026062	5	I	TINGGI
13	601005	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	1.591727402	5	I	TINGGI
14	701008	BENSIN	3.658865916	5	I	TINGGI
15	201038	NASI DGN LAUK	3.16441424	4	I	TINGGI
16	202006	GULA PASIR	0.906848398	4	I	TINGGI
17	701002	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.630671663	4	I	TINGGI
18	102008	DAGING AYAM KAMPUNG	0.352766894	3	II	SEDANG
19	201036	MIE	1.855228102	3	II	SEDANG
20	404005	EMAS PERHIASAN	0.753338416	3	II	SEDANG
21	501009	TARIP RUMAH SAKIT	1.736687865	3	II	SEDANG
22	601002	SEKOLAH DASAR	1.023602532	3	II	SEDANG
23	701003	ANGKUTAN DALAM KOTA	0.712478219	3	II	SEDANG
24	701005	ANGKUTAN UDARA	0.335772429	3	II	SEDANG
25	701022	TARIP KERETA API	0.181192929	3	III	RENDAH
26	106033	KACANG PANJANG	0.19377761	2	III	RENDAH
27	106035	KANGKUNG	0.3161696	2	II	SEDANG
28	106049	CABE HIJAU	0.074598041	2	III	RENDAH
29	106072	WORTEL	0.09154681	2	III	RENDAH
30	108010	JERUK	0.582126738	2	II	SEDANG

Manajemen pemetaan risiko inflasi dari komoditas penyumbang inflasi, disusun berdasarkan:

- Akumulasi sumbangan komoditas lebih besar dari 0,02% dan
- Frekuensi sebagai penyumbang inflasi sama dengan atau lebih dari 4 kali dalam setahun.

MATRIKS MANAJEMEN PENGENDALIAN INFLASI

5 Komoditas Dengan Intensitas & Andil Inflasi Tertinggi



► Program pengendalian inflasi diprioritaskan pada permasalahan komoditas di kuadran 1

Keterangan: *) Kuadran 1: Kontributor tinggi dalam inflasi; Kuadran 2 & 4: Kontributor medium dalam inflasi; Kuadran 3: Kontributor rendah dalam inflasi.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

▶ *VOLATILE FOOD*

KOMODITAS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERAS

1. Teknologi pertanian → belum optimal dalam pemanfaatannya.
 2. Pupuk → disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi; beredarnya pupuk palsu; permasalahan distribusi pupuk bersubsidi.
 3. Infrastruktur → belum optimalnya operasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi; tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi, sehingga menghambat kelancaran distribusi bahan pangan.
 4. Tata niaga → panjangnya rantai distribusi beras; masih banyaknya sistem ijon; penyerapan produksi beras oleh pasar di luar Jawa Tengah sangat tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kondisi pasokan di Jawa Tengah.
 5. Data dan informasi → informasi ketersediaan pasokan bahan pangan strategis yang belum akurat. (al.: data jadwal tanam, jadwal panen, perkiraan produksi, dll.).
 6. Pembiayaan → keterbatasan pembiayaan lembaga keuangan, ketergantungan pada pengepul/pedagang besar.
 7. Pengelolaan ekspektasi harga masyarakat → masih perlu ditingkatkan intensitasnya (a.l: informasi harga dan pasokan, dll.).
-



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

▶ VOLATILE FOOD

KOMODITAS	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Bawang Merah dan Cabai	<ol style="list-style-type: none">1. Teknologi pertanian → belum optimal dalam pemanfaatannya.2. Logistik → terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk produk pertanian (biaya operasionalisasi <i>cold storage</i> sangat mahal).3. Stabilisasi harga → instrumen stabilisasi harga dan pasokan masih terbatas; belum adanya dana subsidi bahan pangan strategis non beras untuk stabilisasi harga.4. Tata niaga → panjangnya rantai distribusi bawang merah dan cabai.
Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras	<ol style="list-style-type: none">1. Biaya produksi → tingginya biaya produksi karena harga pakan yang tinggi (masih tergantung impor); risiko kerugian yang tinggi karena rentan terhadap penyakit.2. Tata niaga → Harga <i>Days Old Chicken</i> (DOC), pakan dll ditentukan oleh perusahaan besar; panjangnya rantai distribusi daging dan telur ayam ras.
Minyak Goreng	<ol style="list-style-type: none">1. Produksi → Terbatasnya jumlah produksi dalam negeri

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

► ADMINISTERED PRICES

KOMODITAS	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Bahan Bakar Rumah Tangga (Elpiji)	<ol style="list-style-type: none">1. Tata niaga → penataan pangkalan yang kurang terdistribusi secara merata.2. Kebijakan penetapan harga → belum adanya ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer; adanya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan 12 kg.

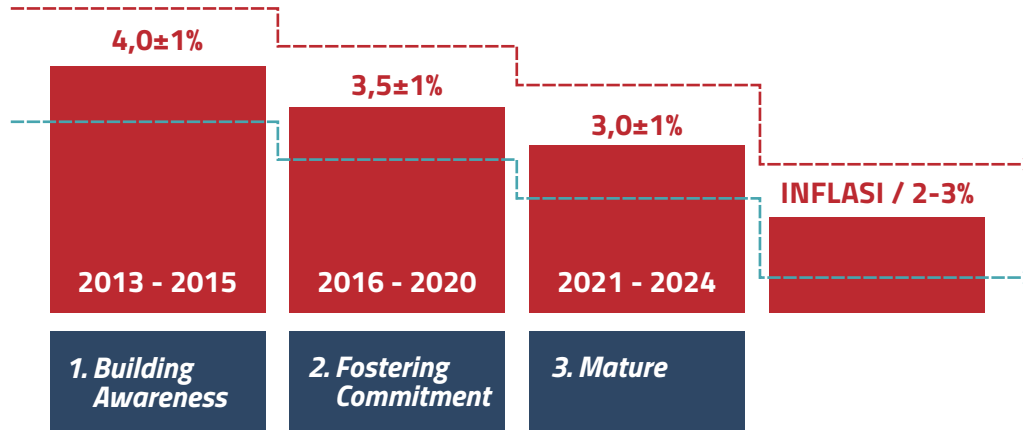
► CORE

KOMODITAS	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Gula Pasir	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya lahan → keterbatasan areal panen; beralihnya fungsi lahan ke komoditas lain yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi.2. Terbatasnya produksi → operasional giling di sebagian pabrik belum kontinyu dan usia pabrik gula di Jateng rata-rata sudah tua sehingga hasil rendemennya rendah; produksi tebu juga diolah menjadi gula merah sehingga mengurangi produksi GKP di pabrik.3. Distribusi → banyaknya tebu yang digiling ke luar Jawa Tengah.4. Pembiayaan → PG mendapat pembiayaan dari distributor besar, sehingga produksi gula langsung diserap oleh swasta; tidak tersedianya dana APBD untuk menyerap produksi gula PG.

ROADMAP
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
JAWA TENGAH



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



PEMENUHAN
KETERSEDIAAN
PASOKAN



PEMBENTUKAN HARGA
YANG TERJANGKAU



PENDISTRIBUSIAN
PASOKAN AMAN DAN
LANCAR



PERLUASAN AKSES
INFORMASI



PENERAPAN
PROTOKOL
MANAJEMEN

Strategi Pengendalian Inflasi TPID Jawa Tengah (PANDAWA LIMA)



KOMODITAS UTAMA PENYUMBANG INFLASI

► ROADMAP DIFOKUSKAN PADA PENGENDALIAN INFLASI (*VOLATILE FOODS*)

<p><i>Volatile Food</i></p>	<p>Komoditas <i>Volatile food</i> yang memiliki bobot tinggi dan frekuensinya sering muncul sebagai pemberi andil inflasi tinggi (2014- Mei 2016).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beras, bobot inflasi 4,59% - Daging ayam ras, bobot inflasi 1,00% - Bawang merah, bobot inflasi 0,93% - Telur ayam ras, bobot inflasi 0,83% - Cabe merah, bobot inflasi 0,28%
<p><i>Administered Prices</i></p>	<p>Komoditas <i>Administered Prices</i> yang memiliki bobot tinggi dan frekuensinya sering muncul sebagai pemberi andil inflasi tinggi (2014- Mei 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bensin, bobot inflasi 3,66% - Tarif listrik, bobot inflasi 2,96% - Rokok kretek filter, bobot inflasi 2,54% - Bahan Bakar Rumah Tangga, bobot inflasi 1,96%
<p><i>Core</i></p>	<p>Komoditas <i>core</i> yang memiliki bobot tinggi dan frekuensinya sering muncul sebagai pemberi andil inflasi tinggi (2014- Mei 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tukang bukan mandor, bobot inflasi 3,32% - Akademi/Perguruan Tinggi, bobot inflasi 1,59% - Gula pasir, bobot inflasi 0,91%

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI PROV. JATENG SECARA UMUM DIARAHKAN UNTUK MENGATASI 5 TANTANGAN KHUSUSNYA TERKAIT INFLASI YANG BERASAL DARI *VOLATILE FOODS*:



1

KETERBATASAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI PERTANIAN



2

GANGGUAN
KETERSEDIAAN STOK
PANGAN SEPANJANG
WAKTU



3

GANGGUAN DISTRIBUSI
AKIBAT HASIL
PRODUKSI
TERDISTRIBUSI KE
LUAR DAERAH &
RELATIF PANJANGNYA
RANTAI DISTRIBUSI



4

INEFISIENSI STRUKTUR
PASAR



5

*ASYMMETRIC
INFORMATION*



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jenis varietas padi unggul. 2. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. 3. Pemberian pelatihan dan pendampingan untuk pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. 2. Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian. 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemanfaatan teknologi modern di seluruh Gapoktan di sentra produksi. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi APBN untuk sektor pertanian di Jawa Tengah secara berkelanjutan dalam rangka optimalisasi penerapan teknologi pertanian.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

▶ VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>2. Adanya permasalahan pada distribusi pupuk bersubsidi, disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi, serta masih maraknya peredaran pupuk palsu.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan usulan terkait Peningkatan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Penurunan HPP (Harga Patokan Pemerintah) oleh Kementerian Pertanian.2. Peningkatan pengawasan dan peredaran pupuk bersubsidi.3. Distribusi yang telah dilaksanakan dengan tertutup harus dibarengi dengan verifikasi sehingga pengecer/distributor bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya.4. Optimalisasi penerapan pupuk organik.	<ol style="list-style-type: none">1. Penghapusan pupuk bersubsidi.2. Optimalisasi penerapan dan peningkatan produksi pupuk organik.		



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
3. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.	1. Peningkatan alokasi APBD di masing-masing kab/kota untuk pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.	1. Peningkatan alokasi APBD untuk program pembangunan 1000 embung.	1. Penyediaan alokasi anggaran APBD untuk infrastruktur yang berasal dari APBN.	1. Dukungan anggaran APBN dalam rangka pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi. 2. Dukungan anggaran APBN untuk percepatan program pembangunan 1000 embung.
4. Tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi, sehingga menghambat kelancaran distribusi bahan pangan.	1. Perbaiki jalan rusak.	1. Peningkatan upaya perbaikan jalan rusak.	1. Pemanfaatan alternatif moda transportasi non jalan raya (a.l.: kereta api, kapal laut). 2. Dukungan regulasi terkait pengaturan RTRW yang berdampak pada penyiapan sarana transportasi.	1. Dukungan alokasi APBN baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan nasional sehingga mendukung distribusi bahan pangan.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
5. Panjangnya rantai distribusi.	1. Optimalisasi penggunaan <i>website</i> info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara <i>online</i> .	1. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).	1. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> dan cakupan komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).	1. Optimalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan strategis.
6. Penyerapan produksi beras oleh pasar di luar Jawa Tengah sangat tinggi.	1. Peningkatan penyerapan dengan membentuk Satker Pengadaan dengan melibatkan anggota KTNA Kab/Kota sebagai anggota Satker Pengadaan. 2. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk mendukung penyerapan beras/gabah melalui BUMD.	1. Perlunya MoU antara Dinas Pertanian dengan Gapoktan/Poktan (penerima subsidi/bantuan) untuk tidak menjual hasil panen ke luar wilayah mengingat belum tercukupinya kebutuhan stok BULOG.	1. Penyediaan alokasi APBD untuk pembelian beras dari petani yang menjamin pemenuhan kebutuhan minimum cadangan beras Jawa Tengah dalam jangka waktu tertentu (contoh kasus: Pasar Induk Beras Cipinang). 2. Pembangunan Pasar Induk Beras Jawa Tengah.	



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
7. Informasi ketersediaan pasokan bahan pangan strategis yang belum akurat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan koordinasi Setbakorluh untuk memberikan data produksi. 2. Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Menjajaki kerjasama penyediaan data produksi dengan pihak terkait (BPS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>database</i> hasil produksi. 2. Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Melanjutkan komunikasi kondisi pasokan terkini ke masyarakat melalui media dalam rangka mengelola ekspektasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat petani, peternak, dan produsen bahan pangan strategis (termasuk asosiasi, koperasi, perusahaan, dll.) untuk menginformasikan kondisi ketersediaan stok yang dimilikinya. 	

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
8. Keterbatasan pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pemberian kredit dengan skema yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian melalui: + BPR BKK (6 bulanan, setiap bulan membayar bunga & setelah pelunasan). + Mitra Jateng 02-25 dilakukan melalui KUR dengan bunga rendah.2. Peningkatan intensitas sosialisasi mengenai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani.3. Pendampingan dan penerapan pola bapak asuh dalam pembiayaan di sektor pertanian (antara lain penerapan sistem tanggung renteng).	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian .2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil.	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian.2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan alokasi APBN untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian.2. Skema KUR yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian.



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BERAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>9. Belum optimalnya pengelolaan ekspektasi masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat yang terkoordinir (a.l. sosialisasi, dan edukasi melalui ILM, <i>talkshow</i>, spanduk, <i>sms broadcast</i>, dll). 2. Peningkatan peran serta kepala daerah (provinsi dan kab/kota) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 3. Pemanfaatan pertemuan Tim Monev Rastra Provinsi dan kab/kota di tingkat desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat (a.l. ulama) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 2. Pemanfaatan pertemuan tingkat desa untuk sosialisasi dalam rangka pembentukan ekspektasi. 3. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 	

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
1. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jenis varietas unggul. 2. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. 3. Pemberian pelatihan dan pendampingan untuk pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian. 2. Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian. 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi modern di seluruh Gapoktan di sentra produksi. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi APBN untuk sektor pertanian di Jawa Tengah secara berkelanjutan dalam rangka optimalisasi penerapan teknologi pertanian.
2. Terbatasnya ketersediaan dan lokasi gudang yang layak untuk penyimpanan produk pertanian (biaya operasional <i>cold storage</i> relatif mahal).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan gudang yang layak di sentra produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan gudang logistik yang layak di sentra produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan gudang logistik yang layak di sentra produksi. 2. Pembangunan pasar induk komoditas bawang merah dan cabai. 	



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>3. Adanya permasalahan pada distribusi pupuk bersubsidi, disparitas harga pupuk subsidi dan non subsidi, serta masih maraknya peredaran pupuk palsu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan usulan terkait Peningkatan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan Penurunan HPP (Harga Patokan Pemerintah) oleh Kementerian Pertanian. 2. Peningkatan pengawasan dan peredaran pupuk bersubsidi. 3. Distribusi yang telah dilaksanakan dengan tertutup harus dibarengi dengan verifikasi sehingga pengecer/distributor bertanggung jawab terhadap wilayah kerjanya. 4. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan pupuk bersubsidi. 2. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik. 		

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

▶ VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>4. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.</p>	<p>1. Peningkatan alokasi APBD di masing-masing Kab/Kota untuk pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.</p>	<p>1. Peningkatan alokasi APBD untuk program pembangunan 1000 embung.</p>	<p>1. Penyediaan alokasi anggaran APBD untuk infrastruktur yang berasal dari APBN.</p>	<p>1. Dukungan anggaran APBN dalam rangka pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.</p> <p>2. Dukungan anggaran APBN untuk percepatan program pembangunan 1000 embung.</p>



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>5. Kurangnya instrumen stabilisasi harga dan pasokan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan BUMD tertentu untuk membantu melakukan stabilisasi harga. 2. Mengoptimalkan peran Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI) dalam penyerapan dan distribusi komoditas pangan strategis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan perwakilan Jawa Tengah di masing-masing provinsi yang bertugas sebagai <i>market intelligent</i>, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Biro Perekonomian dan BUMD. 2. Penetapan alokasi APBD untuk penyerapan produksi komoditas langsung dari produsen. 3. Mengoptimalkan peran Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI) dalam mendistribusikan komoditi pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan alokasi APBD untuk penyerapan produksi komoditas langsung dari produsen. 	

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
6. Panjangnya rantai distribusi kepokmas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan titik-titik distribusi pada 3 komoditas pangan penyumbang inflasi oleh Dinperindag. 2. Peningkatan frekuensi pelaksanaan pasar lelang oleh Dinperindag. 3. Optimalisasi penggunaan <i>website</i> info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara <i>online</i>. 4. Pembangunan jaringan distribusi untuk komoditi pangan lainnya oleh Bulog. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelanjutan pemetaan titik-titik distribusi pada 12 komoditas pangan penyumbang inflasi. 2. Optimalisasi penggunaan <i>website</i> info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara <i>online</i>. 3. Optimalisasi peran lelang komoditas baik secara fisik maupun <i>online</i>. 4. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> dan cakupan komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan strategis.



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
7. Kurangnya instrumen stabilisasi harga dan pasokan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemberian kredit dengan skema yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian melalui : + BPR BKK (6 bulanan, setiap bulan membayar bunga & setelah 6 bulan dilakukan pelunasan). + Mitra Jateng 02-25 melalui KUR dengan bunga rendah. 2. Peningkatan intensitas sosialisasi mengenai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. 3. Pendampingan dan penerapan pola bapak asuh dalam pembiayaan di sektor pertanian (antara lain penerapan sistem tanggung renteng). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi APBN untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Skema KUR yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>8. Informasi ketersediaan pasokan bahan pangan strategis yang belum akurat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan koordinasi Setbakorluh untuk memberikan data produksi. 2. Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Menjajaki kerjasama penyediaan data produksi dengan pihak terkait (BPS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>database</i> hasil produksi. 2. Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Melanjutkan komunikasi kondisi pasokan terkini ke masyarakat melalui media dalam rangka mengelola ekspektasi. 		



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - BAWANG MERAH DAN CABAI

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>9. Belum optimalnya pengelolaan ekspektasi masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat yang terkoordinir (a.l. sosialisasi, dan edukasi melalui ILM, <i>talkshow</i>, spanduk, <i>sms broadcast</i>, dll). 2. Peningkatan peran serta kepala daerah (provinsi dan kab/kota) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 3. Pemanfaatan pertemuan Tim Monev Rastra Provinsi dan kab/kota di tingkat desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat (a.l.ulama) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 2. Pemanfaatan pertemuan tingkat desa untuk sosialisasi dalam rangka pembentukan ekspektasi. 3. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat. 	

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya biaya produksi karena harga pakan yang tinggi (masih tergantung impor).	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan produksi melalui pengembangan jagung hibrida (a.l. melalui pemberian bantuan benih kepada petani).2. Pendampingan dalam rangka meningkatkan produktivitas jagung.3. Identifikasi alternatif pakan ternak.4. Peningkatan intensitas pengelolaan distribusi jagung melalui Bulog.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan teknologi pakan ternak dengan bahan baku lokal.2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara petani jagung dengan perusahaan pakan ternak.3. Pembangunan industri pakan ternak berbasis bahan baku lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan industri pakan ternak berbasis bahan baku lokal.	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pengembangan pakan ternak berbasis bahan baku lokal.



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
2. Kurangnya penyediaan bibit ternak berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran Balai Pembibitan Ternak dan Balai Inseminasi Buatan dalam rangka memproduksi bibit berkualitas. 2. Upaya pembinaan peternak menuju <i>good breeding practise</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumber daya genetik lokal. 2. Pengelolaan usaha pembibitan ternak dengan melibatkan masyarakat peternak. 3. Pengembangan inovasi teknologi pembibitan ternak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan usaha pembibitan tenak besar oleh pemerintah . 2. Upaya penetapan sumber-sumber bibit. 3. Upaya sertifikasi ternak bibit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan wilayah sumber bibit ternak.
3. Berkurangnya peternak mandiri karena lemahnya daya saing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan inti plasma. 2. Penguatan modal pembiayaan bagi peternak mandiri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan adanya peraturan/regulasi untuk penentuan skala usaha dan pengaturan kuota produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan komitmen pelaksanaan regulasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pembentukan regulasi perunggasan yang menggairahkan usaha perunggasan.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
4. Masih adanya penyakit menular pada unggas.	1. Pengendalian dan pencegahan penyakit melalui penerapan <i>biosecurity</i> , vaksinasi, serta pengobatan terprogram.	1. Menekan jumlah kasus penyakit hewan menular pada unggas dengan <i>biosecurity</i> ketat, vaksinasi dan pengobatan terprogram.	1. Mempertahankan status bebas penyakit hewan menular pada unggas melalui kegiatan <i>biosecurity</i> dan pengendalian lalu lintas ternak.	1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemberantasan dan pengendalian penyakit.
5. Fluktuasi harga pada daging ayam.	1. Mengintensifkan sosialisasi konsumsi pangan substitusi, al.: burung puyuh, kelinci, ayam buras, burung dara, itik dan ikan. 2. Bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan operasi pasar jika terjadi peningkatan harga yang tidak wajar.	1. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih intensif untuk pemantauan <i>supply – demand</i> dan perkembangan harga melalui penggunaan <i>website</i> .		1. Regulasi sebagai upaya stabilisasi harga daging ayam .



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
6. Harga <i>Days Old Chicken</i> (DOC) ditentukan oleh perusahaan besar.	1. Koordinasi secara rutin dan kontinyu antar <i>stakeholder</i> yang ada di wilayah untuk memperpendek mata rantai perdagangan.	1. DOC ditentukan melalui mekanisme pasar. 2. Mengoptimalkan peran KPPU dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan produksi.		1. Adanya regulasi Pemerintah mengenai harga acuan (harga tertinggi) DOC.
7. Panjangnya rantai distribusi kepokmas.	1. Pemetaan titik-titik distribusi pada 3 komoditas pangan penyumbang inflasi oleh Dinperindag. 2. Optimalisasi penggunaan <i>website</i> info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara <i>online</i> . 3. Pembangunan jaringan distribusi untuk komoditi pangan lainnya oleh Bulog.	1. Kelanjutan pemetaan titik-titik distribusi pada 12 komoditas pangan penyumbang inflasi. 2. Optimalisasi penggunaan <i>website</i> info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara <i>online</i> . 3. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).	1. Peningkatan jaringan <i>outlet</i> dan cakupan komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).	

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
8. Keterbatasan pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemberian kredit dengan skema yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian melalui : + BPR BKK (6 bulanan, setiap bulan membayar bunga & setelah 6 bulan dilakukan pelunasan). + Mitra Jateng 02-25 melalui KUR dengan bunga rendah. 2. Peningkatan intensitas sosialisasi mengenai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani. 3. Pendampingan dan penerapan pola bapak asuh dalam pembiayaan di sektor pertanian (antara lain penerapan sistem tanggung renteng). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi APBD untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Replikasi implementasi SRG yang telah berhasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan alokasi APBN untuk pembiayaan usaha produktif sektor pertanian. 2. Skema KUR yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian.



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>9. Informasi ketersediaan pasokan bahan pangan strategis yang belum akurat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan koordinasi Setbakorluh untuk memberikan data produksi. 2. Mengintegrasikan data/informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Menjajaki kerjasama penyediaan data produksi dengan pihak terkait (BPS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>database</i> hasil produksi. 2. Mengintegrasikan data/informasi pasokan ke dalam SiHaTi. 3. Melanjutkan komunikasi kondisi pasokan terkini ke masyarakat melalui media dalam rangka mengelola ekspektasi. 		

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - DAGING AYAM DAN TELUR AYAM RAS

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
10. Belum optimalnya pengelolaan ekspektasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat yang terkoordinir (a.l. sosialisasi, dan edukasi melalui ILM, <i>talkshow</i>, spanduk, <i>sms broadcast</i>, dll)2. Peningkatan peran serta kepala daerah (provinsi dan kab/kota) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat (a.l.ulama) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.2. Pemanfaatan pertemuan tingkat desa untuk sosialisasi dalam rangka pembentukan ekspektasi.3. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.	



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► VOLATILE FOOD - MINYAK GORENG

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya jumlah produksi dalam negeri.	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama dengan pabrik produsen minyak goreng untuk menjaga pasokan Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none">1. Bekerjasama dengan investor dalam rangka pengembangan industri hilir CPO.	<ol style="list-style-type: none">1. Menambah pabrik hilir pengolah CPO di Jateng.2. Menumbuhkan industri minyak kelapa (VCO) di Jateng dengan skala BUMD.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi sarana pengolahan minyak kelapa (VCO)/subsitusi CPO.2. Mempermudah perijinan untuk industri minyak Sawit/CPO di Jawa Tengah.3. Regulasi pelarangan/ pembatasan ekspor kelapa glondong.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► ADMINISTERED PRICES - BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA (ELPIJI)

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
1. Penataan pangkalan yang kurang terdistribusi secara merata.	1. Mendukung Pertamina untuk berkoordinasi dengan Kab/Kota dalam penataan pangkalan dengan skema satu desa minimal satu pangkalan.	1. Implementasi program satu desa minimal satu pangkalan. 2. Mengintensifkan pengawasan distribusi elpiji untuk meminimalkan kelangkaan.	1. Mengintensifkan pengawasan distribusi elpiji untuk meminimalkan kelangkaan.	
2. Belum adanya ketentuan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pengecer.	1. Menyusun analisa penentuan HET di tingkat pengecer (Harga pengecer sangat ditentukan oleh kondisi topografi dan jarak antara pangkalan dan konsumen).	1. Pembuatan ketentuan HET di tingkat pengecer oleh tiap Pemerintah Kab/Kota .	1. Mengintensifkan pengawasan terhadap penerapan HET di tingkat pengecer.	



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► ADMINISTERED PRICES - BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA (ELPIJI)

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
3. Adanya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan 12 kg.	1. Mendukung implementasi pelaksanaan distribusi tertutup untuk elpiji 3kg.	1. Mendukung implementasi pelaksanaan distribusi tertutup untuk elpiji 3kg.	1. Menghapus subsidi elpiji 3kg.	1. Merekomendasikan distribusi tertutup untuk elpiji 3kg. 2. Merekomendasikan peluncuran elpiji tabung 5 kg non subsidi.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► ADMINISTERED PRICES - ANGKUTAN DALAM KOTA DAN ANTAR KOTA

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya fleksibilitas penyesuaian tarif angkutan umum mengikuti kenaikan harga BBM, namun tidak sebaliknya.	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan tarif batas atas dan batas bawah (Pergub) khusus kelas ekonomi, sehingga tarif tidak terlalu berfluktuasi mengikuti perkembangan harga BBM.2. Pengawasan secara intensif terhadap implementasi kebijakan tarif di lapangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tarif di lapangan.		



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► CORE – GULA

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
1. Terbatasnya areal panen dan jumlah produksi gula.	1. Koordinasi dengan pabrik gula untuk membeli tebu petani	1. Menjaga kontinuitas terhadap operasional Pabrik Gula.	1. Penataan varietas benih tebu untuk menjaga ketersediaan bahan baku.	1. Menetapkan jenis varietas yg cocok untuk lokasi tertentu
2. Beralihnya fungsi lahan dan komoditas lain yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi.	1. Bantuan sarana dan prasarana.	1. Pembinaan dan pemilihan benih tebu dalam rangka penataan varietas.	1. Jaminan rendemen oleh pabrik gula.	1. Pengawasan RTRW perlu diaplikasikan sampai pada sanksinya.
3. Operasional giling di sebagian pabrik belum kontinu dan usia pabrik gula di Jateng rata rata sudah tua sehingga hasil rendemennya rendah.	1. Membentuk tim-tim pengawas rendemen yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi/ Akademisi, pemerintah pusat, provinsi dan <i>stakeholder</i> .	1. Revitalisasi Pabrik Gula.	1. Seluruh PG memiliki peralatan yang modern guna peningkatan produksi gula di Jateng.	1. Kebijakan anggaran melalui kementerian BUMN dan Kementerian perindustrian atau investasi dari swasta. 2. Pengawasan dan sanksi tegas terhadap tindakan penimbunan gula.

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI – PROGRAM KERJA

► CORE – GULA

PERMASALAHAN	SOLUSI JK PENDEK (2016-2017)	SOLUSI JK MENENGAH (2018-2020)	SOLUSI JK PANJANG (2021-2024)	DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT
<p>4. Banyaknya tebu yang digiling keluar Jawa Tengah dan adanya tebu yang diolah menjadi gula merah sehingga mengurangi produksi GKP di PG.</p>	<p>1. Pabrik Gula menjamin agar hasil rendemennya akurat dan transparan terhadap hasil rendemen yang diperoleh.</p>	<p>1. Perlu adanya upaya untuk menciptakan harmonisasi antara Pabrik Gula dengan Petani.</p>	<p>1. Perbaiki terhadap sistem manajemen tebang angkut sesuai dengan acuan.</p>	<p>1. Kementerian BUMN menerapkan SOP tentang rendemen Pabrik Gula di PTPN.</p>
<p>5. Pabrik Gula mendapat pembiayaan dari distributor besar, sehingga produksi gula langsung diserap oleh swasta.</p>	<p>1. Bulog atau BUMD yang ditunjuk dapat melakukan pembiayaan kepada PG, sehingga produksi PG dapat diserap oleh Bulog atau BUMD.</p>	<p>1. Alokasi APBD untuk Bulog atau BUMD yang ditunjuk agar dapat melakukan pembiayaan kepada PG, sehingga produksi PG dapat diserap oleh Bulog atau BUMD.</p>		<p>1. Penetapan gula sebagai komoditas yang diatur oleh pemerintah (penetapan HET).</p>

LAMPIRAN: PROGRAM KERJA BERDASARKAN RANTAI NILAI



PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI JATENG



PRODUKSI

Fase Awal (2016-2017)

- + Pengembangan jenis varietas padi unggul.
- + Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.
- + Pemberian pelatihan dan pendampingan untuk pemanfaatan teknologi pertanian.
- + Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian.
- + Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan gudang yang layak di sentra produksi
- + Pengembangan jagung hibrida (a.l. melalui pemberian bantuan benih kepada petani).
- + Pendampingan dalam rangka meningkatkan produktivitas jagung.
- + Identifikasi alternatif pakan ternak.

Fase Kedua (2018-2020)

- + Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.
- + Peningkatan penyediaan jumlah demplot untuk uji coba teknologi pertanian.
- + Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- + Pembangunan gudang logistik yang layak minimal di 80% sentra produksi
- + Pembentukan sistem resi gudang di sentra produksi
- + Perlu adanya kajian pengembangan pakan ternak dengan bahan baku lokal.
- + Menjajaki kemungkinan intermediasi kemitraan antara petani jagung dengan perusahaan pakan ternak.
- + Pembangunan industri pakan ternak.

Fase Akhir (2021-2024)

- + Pemanfaatan teknologi modern di seluruh Gapoktan di sentra produksi.
- + Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian berbasis organik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
- + Tersedianya gudang yang layak di seluruh sentra produksi.
- + Sistem resi gudang sudah berjalan di seluruh sentra produksi.



PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI JATENG



DISTRIBUSI & TATA NIAGA

Fase Awal (2016-2017)

- + Optimalisasi penggunaan *website* info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara *online*.
- + Pemetaan titik-titik distribusi pada 3 komoditas pangan penyumbang inflasi oleh Dinperindag.
- + Peningkatan frekuensi pelaksanaan pasar lelang oleh Dinperindag.
- + Optimalisasi penggunaan *website* info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara *online*.
- + Pembangunan jaringan distribusi untuk komoditi pangan lainnya oleh Bulog.

Fase Kedua (2018-2020)

- + Peningkatan jaringan *outlet* Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).
- + Kelanjutan pemetaan titik-titik distribusi pada 12 komoditas pangan penyumbang inflasi.
- + Optimalisasi penggunaan *website* info harga dan produksi (SiHaTi), serta belanja komoditas secara *online*.
- + Optimalisasi peran lelang komoditas baik secara fisik maupun *online*.
- + Peningkatan jaringan *outlet* Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).

Fase Akhir (2021-2024)

- + Peningkatan jaringan *outlet* dan cakupan komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).
- + Dukungan regulasi terkait pengaturan RTRW yang berdampak pada penyiapan sarana transportasi.
- + Peningkatan jaringan *outlet* dan cakupan komoditas Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI).

PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI JATENG



INFRASTRUKTUR

Fase Awal (2016-2017)

- + Peningkatan alokasi APBD di masing-masing kab/kota untuk pemeliharaan infrastruktur daerah irigasi.
- + Perbaikan jalan rusak.

Fase Kedua (2018-2020)

- + Peningkatan alokasi APBD untuk program pembangunan 1000 embung.
- + Peningkatan upaya perbaikan jalan rusak.

Fase Akhir (2021-2024)

- + Penyediaan alokasi anggaran APBD untuk infrastruktur yang berasal dari APBN.
- + Pemanfaatan alternatif moda transportasi selain darat.
- + Dukungan regulasi terkait pengaturan RTRW yang berdampak pada penyiapan sarana transportasi.



PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI JATENG



PASAR

Fase Awal (2016-2017)

- + Peningkatan penyerapan dengan membentuk Satker Pengadaan dengan melibatkan anggota KTNA Kab/Kota sebagai anggota Satker Pengadaan.
- + Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk mendukung penyerapan beras/gabah melalui BUMD.
- + Penunjukkan BUMD tertentu untuk membantu melakukan stabilisasi harga.
- + Mengoptimalkan BUMD untuk membantu stabilisasi harga.
- + Mengusulkan anggaran dana subsidi bahan pangan non beras untuk stabilisasi harga.
- + Koordinasi secara rutin dan kontinyu antar *stakeholder* yang ada di wilayah untuk memperpendek mata rantai perdagangan.

Fase Kedua (2018-2020)

- + Perlunya MoU antara Dinas Pertanian dengan Gapoktan/Poktan (penerima subsidi/bantuan) untuk tidak menjual hasil panen ke luar wilayah mengingat belum tercukupinya kebutuhan stok BULOG.
- + Menempatkan perwakilan Jawa Tengah di masing-masing provinsi yang bertugas sebagai *market intelligent*.
- + Informasi dari *market intelligent* ditindaklanjuti oleh Biro Perekonomian dan BUMD.
- + Mengoptimalkan peran TTI dan RPK dalam medistribusikan komoditi pangan.
- + Mengoptimalkan peran KPPU dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan produksi.

Fase Akhir (2021-2024)

- + Penyediaan alokasi APBD untuk pembelian beras dari petani yang menjamin pemenuhan kebutuhan minimum cadangan beras Jawa Tengah dalam jangka waktu tertentu (contoh kasus: Pasar Induk Beras Cipinang).
- + Pembangunan Pasar Induk Beras Jawa Tengah.

PROGRAM KERJA PENGENDALIAN INFLASI JATENG



KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Fase Awal (2016-2017)

- + Memanfaatkan koordinasi Setbakorluh untuk memberikan data produksi.
- + Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi.
- + Menjajaki kerjasama penyedia data produksi dengan pihak terkait (BPS).
- + Penyusunan dan implementasi program pengelolaan ekspektasi masyarakat yang terkoordinir (a.l. sosialisasi, dan edukasi melalui ILM, *talkshow*, spanduk, *sms broadcast*, dll).
- + Peningkatan peran serta kepala daerah (provinsi dan kab/kota) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.
- + Pemanfaatan pertemuan Tim Monev Rastra Provinsi dan kab/kota di tingkat desa.

Fase Kedua (2018-2020)

- + Penyusunan *database* hasil produksi.
- + Mengintegrasikan data/ informasi pasokan ke dalam SiHaTi.
- + Melanjutkan komunikasi kondisi pasokan terkini ke masyarakat melalui media dalam rangka mengelola ekspektasi.
- + Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat (a.l.ulama) dalam berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.
- + Pemanfaatan pertemuan tingkat desa untuk sosialisasi dalam rangka pembentukan ekspektasi.
- + Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Fase Akhir (2021-2024)

- + Pemanfaatan informasi harga yang terdapat di SiHaTi oleh masyarakat.
- + Melanjutkan berbagai program pengelolaan ekspektasi masyarakat.